

PERAN MEDIA MASSA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA: ANTARA HAK PUBLIK UNTUK MENGETAHUI DAN HAK TERDAKWA ATAS PRIVASI

Putri Ramadhani, NajriAulia, Saidatul Umniyah, Husnul Khatimah, Nur Aisah, Lailatul Husna, Muhammad Farhan

putrihamdani007@gmail.com, najriaulia416@gmail.com, saidatulumniyyah@gmail.com,
husnullk23@gmail.com, na9653991@gmail.com, lailatulhusnasiregar14@gmail.com,
damanikfarhan731@gmail.com,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Media massa memainkan peran penting dalam proses peradilan pidana dengan memberikan informasi kepada publik tentang proses hukum yang sedang berlangsung. Sebagai bagian dari kebebasan pers, media berfungsi untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan serta memberikan masyarakat kesempatan untuk melihat dan memahami proses hukum. Namun, peran media juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan hak terdakwa atas privasi. Konstitusi menjamin hak publik untuk memperoleh informasi, sementara hak terdakwa atas privasi, yang mencakup perlindungan atas identitas dan detail pribadi, juga harus dihormati agar tidak mengganggu proses peradilan yang adil. Dalam pemberitaan tentang kasus pidana, ketegangan antara kedua hak ini sering muncul, terutama ketika media menyiarkan informasi yang dapat memengaruhi opini publik sebelum putusan pengadilan. Artikel ini membahas bagaimana media memengaruhi persepsi publik tentang kasus pidana, serta bagaimana pengadilan dan lembaga terkait dapat memastikan bahwa pemberitaan tetap sesuai dengan etika jurnalistik, tidak mengganggu hak terdakwa, dan tetap mempertahankan integritas hukum. Selain itu, pembicaraan ini mencakup aturan dan peraturan yang harus diikuti oleh media untuk menghindari informasi yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, peran pengadilan dalam mengontrol pemberitaan yang berkaitan dengan proses hukum. Oleh karena itu, pemahaman tentang fungsi media dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat membantu membangun sistem peradilan yang lebih jelas, adil, dan seimbang.

Kata Kunci: Hak Publik, Hak Privasi, Media Massa, Peradilan Pidana, Trasparasi Hukum

Abstract

The mass media plays an important role in the criminal justice process by providing information to the public about ongoing legal proceedings. As part of press freedom, the media serves to create transparency and accountability in the justice system as well as providing the public with an opportunity to view and understand the legal process. However, the role of the media also presents challenges, particularly in terms of maintaining a balance between the public's right to know and the defendant's right to privacy. The Constitution guarantees the public's right to information, while the accused's right to privacy, which includes protection of identity and personal details, must also be respected so as not to interfere with a

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright :

Author Publish

by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

fair trial. In reporting on criminal cases, tensions between these two rights often arise, especially when the media broadcasts information that may influence public opinion prior to a court decision. This article discusses how the media influences public perceptions of criminal cases, as well as how courts and relevant institutions can ensure that reporting complies with journalistic ethics, does not interfere with the rights of the accused, and maintains the integrity of the law. In addition, the conversation covers the rules and regulations that the media should follow to avoid information that is detrimental to either party. In addition, the role of the courts in controlling news coverage related to legal proceedings. Therefore, an understanding of the function of the media in the criminal justice system is expected to help build a clearer, fairer and more balanced justice system.

Keywords: *Public Rights, Privacy Rights, Mass Media, Criminal Justice, Legal Transparency*

PENDAHULUAN

Media massa, sebagai media utama untuk komunikasi dan informasi di masyarakat modern, memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum, khususnya dalam proses peradilan pidana, karena mereka berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum dengan memberikan informasi yang relevan dan terkini tentang jalannya proses hukum. Fungsi ini tidak hanya membuat proses peradilan pidana lebih transparan, tetapi juga membantu menjaga kerahasiaan proses hukum.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, media massa berperan dalam menjamin akuntabilitas dan keterbukaan, memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks peradilan pidana, media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan fakta-fakta yang ada dengan akurat, objektif, dan tanpa memihak, sehingga publik dapat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai perkara yang sedang ditangani oleh lembaga peradilan.

Namun, peran media ini penuh dengan masalah yang kompleks. Ada dilema antara hak terdakwa untuk melindungi privasi mereka dan hak publik untuk mengetahui. Sebagai bagian dari hak untuk tahu yang dijamin oleh konstitusi, masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana suatu kasus pidana berjalan. Di sisi lain, terdakwa juga memiliki hak untuk melindungi identitas dan informasi pribadi mereka, karena informasi yang berlebihan dapat merusak asas praduga tak bersalah dan merugikan hak-hak pribadi terdakwa. Ketegangan antara kedua hak ini sangat penting di era media modern, di mana penyebaran informasi dapat dilakukan dengan cepat melalui berbagai platform.

Media massa di sistem peradilan pidana tidak hanya memberikan informasi kepada publik, tetapi juga berperan sebagai pengontrol sosial, yang memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana masyarakat melihat keadilan. Opini publik dapat dengan mudah dipengaruhi oleh pernyataan yang tidak bijaksana atau terlalu spekulatif. Ini dapat merusak kredibilitas proses peradilan dan reputasi pihak-pihak yang terlibat, terutama terdakwa. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari bagaimana media menjalankan tugasnya dengan adil, melindungi hak publik untuk mengetahui sambil menghormati hak terdakwa atas privasi mereka, dan bagaimana pengadilan dapat mengontrol pemberitaan agar tidak mengganggu proses hukum yang adil dan transparan.

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, media massa menghadapi tantangan yang lebih besar dalam peradilan pidana. Platform digital seperti media sosial dan situs berita online memungkinkan informasi menyebar dengan cepat, seringkali tanpa

pengawasan yang memadai. Dalam situasi seperti ini, etika jurnalistik dan peraturan yang mengatur pemberitaan tentang peradilan pidana menjadi semakin penting untuk menjamin hak publik untuk informasi serta hak individu lainnya, terutama hak terdakwa atas privasi dan hak untuk memperoleh peradilan yang adil.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang peran media massa dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan hak terdakwa atas privasi. Selain itu, artikel ini akan membahas bagaimana media dan pengadilan dapat bekerja sama untuk membuat pemberitaan yang tidak hanya informatif tetapi juga etis, adil, dan tidak merugikan pihak tertentu. Kajian ini diharapkan untuk meningkatkan pemahaman tentang metode yang dapat digunakan untuk membuat sistem peradilan yang lebih transparan dan seimbang yang bermanfaat bagi semua orang yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Akibatnya, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang seberapa pentingnya integrasi yang seimbang antara masyarakat, pengadilan, dan media untuk membangun sistem peradilan pidana yang transparan, adil, dan seimbang yang pada akhirnya akan menguntungkan seluruh masyarakat.

Menurut Manufacturing Consent, Herman dan Chomsky (1988) menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk membuat narasi yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap suatu perkara pidana. Media massa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mempengaruhi bagaimana informasi tersebut diterima oleh publik, baik dalam konteks fakta maupun pendapat. Beberapa studi menunjukkan bahwa opini publik tentang keputusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Menurut Mendelsohn (2015) dalam bukunya yang berjudul "The Media and the Criminal Justice System" ada kemungkinan bahwa laporan media yang tidak jelas dan spekulatif dapat merusak asas praduga tak bersalah, yang seharusnya dihormati oleh sistem peradilan pidana. Media massa yang memberitakan secara berlebihan atau sensasional dapat mempengaruhi pandangan masyarakat sebelum keputusan pengadilan, mempengaruhi proses hukum yang seharusnya adil dan tidak dipengaruhi oleh opini publik.

Salah satu topik utama yang sering dibahas dalam literatur mengenai media dan peradilan pidana adalah ketegangan antara hak publik untuk mengetahui dan hak terdakwa atas privasi. Sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan hak untuk mendapatkan informasi yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 di Indonesia, masyarakat berhak mengetahui jalannya proses peradilan. Blanchette & Johnson (2004) dalam *The Right to Privacy* menjelaskan bahwa meskipun ada hak untuk mendapatkan informasi, hak individu untuk melindungi privasinya juga harus dihormati, terutama di dalam ranah hukum. Di sisi lain, Laufer (2009) dalam studi yang dipublikasikan di *Journal of Criminal Justice*, menyoroti bahwa hak privasi terdakwa dalam peradilan pidana dapat terancam apabila media terlalu mendalam membahas identitas dan informasi pribadi mereka. Penyebaran informasi yang tidak tepat atau berlebihan dapat merusak reputasi terdakwa, meskipun mereka belum terbukti bersalah di pengadilan. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak publik dan hak privasi sangat penting untuk dijaga.

Dengan pertumbuhan media sosial, menjadi lebih sulit bagi media untuk menjaga keseimbangan antara hak publik dan hak privasi. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas, seperti yang ditunjukkan oleh McCarthy (2013) dalam "Role of Social Media in Modern Trials". Ini menambah keadaan yang lebih buruk ketika spekulasi atau bahkan informasi yang tidak benar tentang perkara pidana tersebar sebelum proses peradilan selesai. Dalam konteks ini, Tufekci (2014) mengingatkan dalam "The Filter Bubble" bahwa masyarakat cenderung terpapar informasi yang mendukung pendapat mereka sendiri, yang menyebabkan opini tentang kasus pidana menjadi lebih polarisasi.

Bagaimana pengadilan dapat mengontrol pemberitaan media selama peradilan pidana merupakan peran penting yang perlu dibahas dalam literatur ini. Menurut Gerrshon (2012) dalam bukunya "Role of Courts in Regulating Media Reporting", pengadilan dapat mengontrol bagaimana pemberitaan dilakukan, terutama ketika pemberitaan tersebut dapat mengganggu

proses peradilan yang adil. Pengadilan dapat mengeluarkan perintah atau keputusan yang membatasi jenis informasi yang boleh dipublikasikan atau bahkan menunda pemberitaan selama proses peradilan berlangsung. Selain itu, Rosen (2004) dalam "The Press, the Court, and the Public" menekankan betapa pentingnya media dan lembaga peradilan bekerja sama untuk membuat saluran informasi yang jelas dan tidak merugikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengadilan untuk memantau pemberitaan tentang kasus pidana agar proses peradilan dapat berjalan dengan adil dan tidak terpengaruh oleh opini publik yang dibentuk oleh pemberitaan yang salah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran media dalam peradilan pidana adalah elemen yang sangat kompleks dan menantang. Meskipun media memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan, mereka juga menghadapi tantangan yang signifikan antara memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi dan menjaga hak privasi terdakwa. Ketegangan antara kedua hak ini harus ditangani dengan hati-hati, terutama di era teknologi saat ini, di mana tidak ada pengawasan yang memadai untuk menyebarkan informasi. Oleh karena itu, etika jurnalistik dan struktur pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa pemberitaan tetap mengikuti standar hukum dan keadilan.

METODE PENELITIAN

Terkait Dengan Pengkajian "Peran Media Massa dalam Proses Peradilan Pidana: Antara Hak Publik untuk Mengetahui dan Hak Terdakwa atas Privasi" Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif, Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana media massa memengaruhi proses peradilan pidana dan persepsi publik, serta bagaimana pengadilan dan media dapat bekerja sama untuk menjaga keseimbangan antara hak publik dan hak privasi terdakwa. Penelitian ini juga mengeksplorasi tantangan yang dihadapi media di era digital dalam hal etika pemberitaan. Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana media dan pengadilan dapat bekerja sama untuk membuat pemberitaan yang adil dan etis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media massa merupakan sarana komunikasi yang memungkinkan pesan-pesan disebarluaskan secara serentak dan cepat kepada berbagai khalayak. Keunggulan media massa dibandingkan media lainnya adalah mampu mengatasi hambatan spasial dan temporal. Faktanya, media massa dapat menyebarkan pesan secara instan dan tanpa batas dalam waktu yang bersamaan. Yang Dimana Media massa sangat penting sekali dalam proses peradilan pidana terutama dalam kasus kasus yang bersifat public contohnya kasus korupsi, pembunuhan dan berita berita lainnya, oleh karena itu disini peneliti Mengangkat Judul "*Peran Media Massa dalam Proses Pradilan Pidana:Antara Hak Publik Untuk Mengetahui dan Hak Terdakwa atas Perivasi*" Untuk mengkaji terkait seberapa efektifnya peran media massa dalam menyiarkan berita berita terutama dalam halnya Tindak Pidana, dan Batasan-batasan penyiaran berita agar tidak mempengaruhi Hak-hak Pelaku maupun Korban Atas Hak Terdakwa dan Privasi.. Dalam artikel ini, kami akan membahas aspek-aspek kebebasan informasi dalam peradilan pidana, termasuk hak untuk mendapatkan informasi, batasan untuk mendapatkan informasi tersebut, dan efeknya terhadap proses hukum.() Oleh Sebab itu disilah letak pengkajiannya yang lebih Lanjut. Oleh Sebab itu disilah letak pengkajiannya yang lebih Lanjut.

Salah satu prinsip utama sistem peradilan adalah kebebasan informasi, yang memastikan bahwa orang umum dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan proses hukum. Walaupun kebebasan informasi ini bisa diakses dimanapun ada hal yang lebih penting yakni Batasan-batas Media Massa dalam Menyiarkan suatu berita, walupun dari beberapa penelitian yang kami lakukan bahwasannya Media Massa sudah sangat baik dalam penyampaian berita dari beberapa flatfom yang tersedia, dan media massa juga berhasil mengangkat berita berita yang vacuum sesaat Kembali lagi di telaah Kembali ke public contohnya Kasus Pembunuhan Vina, yang Dimana kasusnya sempat redup dari beberapa tahun sesaat. Dan dalam kasus terbaru Media Massa juga berhasil Memberikan Pengetahuan terutama dalam kasus Demo Indonesia Darurat

yang berkaitan dengan pengrevisian Undang - undang Pilkada dan Kasus-kasus yang lainnya yang sedang hangat hangatnya yakni Mediamasa Selalu mengawal Kasus Korupsi PT Timah yang merugikan negara sampai 300 T. dan dilanjut tentang Hak-hak apa saja yang boleh di kawal terutama dalam mengawal kasus kasus pidana yang sangat berkembang ini.

Hak Akses Informasi dalam Peradilan Pidana Beberapa aspek hak akses informasi dalam peradilan pidana termasuk:

- Akses terhadap dokumen dan bukti: Warga negara memiliki hak untuk mengakses dokumen dan bukti yang terkait dengan kasus pidana, seperti surat dakwaan, keputusan pengadilan, dan berita acara pemeriksaan. Dengan akses ini, masyarakat dapat memahami proses hukum dan menilai keadilan proses peradilan.
- Akses terhadap informasi tentang kasus: Informasi tentang kasus pidana, seperti identitas terdakwa, tuduhan, dan bagaimana proses hukum berjalan, penting untuk meningkatkan kejelasan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- Akses terhadap informasi tentang putusan pengadilan: Putusan pengadilan adalah dokumen publik yang dapat diakses sehingga orang dapat memahami dasar hukumnya dan menilai keadilan proses peradilan.

Batasan pada Kebebasan Informasi di Peradilan Pidana

Meskipun kebebasan informasi sangat penting, ada batasan yang terkait dengannya. Hak-hak individu, keamanan negara, dan proses hukum dilindungi oleh batasan ini. Beberapa batasan umum adalah:

- Informasi yang bersifat rahasia: Informasi seperti data pribadi terdakwa, informasi saksi, atau strategi penyelidikan dapat diakses dengan cara yang berbeda untuk melindungi privasi dan keamanan individu.
- Informasi yang dapat mengganggu proses hukum: Jika ada informasi yang dapat mengganggu proses hukum, seperti bukti yang belum diungkap atau informasi yang dapat mempengaruhi juri, juri mungkin tidak dapat mempertahankan keadilan dan integritas proses peradilan dengan bebas.
- Informasi yang mengancam keamanan nasional: Informasi tentang operasi intelijen atau rencana terorisme dapat dilarang untuk melindungi kepentingan negara. (Atma Sasmita, 19960)

Dari beberapa Hak dan Batasan - Batasan ini wajib diketahui Masyarakat Maupun Media Massa dalam Mengawal beberapa kasus terutama dalam kasus tindak pidana.

Pada dasarnya, sistem peradilan pidana berfungsi sebagai proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sangat terkait dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik yang berkaitan dengan hukum substantif maupun acara pidana, karena undang-undang pidana pada dasarnya adalah penegakan hukum pidana in abstracto yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana in concreto. Oleh karena itu, peran perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana sangat penting, karena perundang-undangan pidana Lembaga legislatif akan melaksanakan program kebijakan dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, semua merupakan bagian dari politik hukum, yang pada dasarnya beroperasi dalam tiga bentuk: pembentukan hukum, penegakan hukum, dan pelaksanaan otoritas dan wewenang. Di antara perubahan yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai Pasal 68) dan pembentukan lembaga praperadilan yang memungkinkan hakim untuk mengawasi pelaksanaan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan dan penuntutan. Di antara perubahan yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai Pasal 68) dan pembentukan lembaga praperadilan yang memungkinkan hakim untuk mengawasi pelaksanaan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan dan penuntutan. Dengan masuknya UU No. 8 Tahun 1981 ke dalam sistem hukum Indonesia, terjadi pergeseran paradigma yang mengutamakan hak asasi seorang tersangka dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Selain itu, ada pendapat bahwa hak asasi tersangka harus dilindungi setelah seorang tersangka ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili di pengadilan.

Dari uraian di atas maka pendekatan yang mempergunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai suatu kesatuan, interelasi dan korelasi satu sama lain. Konkritnya, unsur-unsur dalam proses penegakan hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Dalam sistem peradilan pidana, sistem ini bekerja melalui subsistem berikut:

a. Subsistem kepolisian: Hak asasi manusia yang dirumuskan dalam pasal-pasal yang ada dalam Hukum Acara Pidana diterapkan secara teoritis sejak tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan, di mana tersangka atau terdakwa berada dalam posisi yang setara dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum. (Undang-undang Tahun 2002 No.2, 2005)

b. Sistem kejaksaan (Penuntut Umum), sistem pengadilan (Hakim), sistem lembaga pemasyarakatan, dan sistem penasehat umum (Advokat).

Hak-hak Dasar Terdakwa Terkait Privasi Media Massa dan Efek pada Persepsi Publik dalam Kasus Pidana

Terdakwa adalah pihak yang sedang menjalani proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana. Salah satu prinsip utama sistem hukum adalah perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak dasar yang dimiliki oleh terdakwa dalam setiap proses hukum yang berlangsung. Sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Untuk menjaga martabat dan kebebasan setiap orang dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang diperlakukan secara tidak adil, hak-hak dasar ini diatur. Oleh karena itu, hak-hak dasar terdakwa dalam sistem hukum pidana dimaksudkan untuk menjaga keadilan dalam proses peradilan dan melindungi orang-orang yang terlibat.

1. Hak untuk membela diri

Setiap terdakwa berhak untuk mempertahankan diri dari tuduhan yang diajukan terhadapnya. Dalam hal ini, terdakwa berhak untuk mengajukan pembelaan dan menjelaskan tuduhan yang diajukan terhadapnya. Selain itu, hak ini mencakup hak untuk mendapatkan perawatan hukum yang layak dari profesional. Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pemikiran dan versi mereka tentang peristiwa yang terjadi melalui pembelaan diri, yang merupakan komponen penting dari proses peradilan yang adil. Hak terdakwa untuk pembelaan diri diperlukan, dan terdakwa tidak dapat dianggap bersalah sebelum ada pembuktian yang sah dan jelas atas kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu, setiap terdakwa harus diberi kesempatan yang adil untuk menjelaskan keadaan mereka dan memastikan bahwa hak-haknya sebagai individu dilindungi dengan baik. (Bakti, 2019)

2. Hak atas pengadilan adil

Setiap terdakwa dalam kasus pidana berhak atas persidangan yang tidak memihak dan dijalani dengan prinsip keadilan. Hak ini mencakup hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen tanpa terpengaruh oleh pihak luar atau kekuasaan apapun. Pengadilan yang adil didasarkan pada proses yang transparan dan bukti yang sah. Terdakwa tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif atau diputuskan berdasarkan prasangka atau pendapat yang tidak berdasar pada bukti. Keputusan pengadilan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang objektif. Terdakwa juga berhak atas kesempatan yang sama untuk menghadirkan saksi, bukti, dan argumen yang mendukung pembelaannya. Ini adalah bagian dari hak atas pengadilan yang adil. Dalam hal ini, sangat penting untuk memastikan bahwa persidangan berlangsung secara terbuka dan tidak ada upaya untuk menyembunyikan atau memanipulasi fakta yang ada.

3. Hak atas privasi

Hak utama seorang terdakwa. Hak ini melindungi kehidupan pribadi terdakwa dari intervensi ilegal. Terdakwa sering menjadi sasaran perhatian publik, terutama dalam kasus kejahatan sensasional atau kontroversial. Setiap terdakwa berhak untuk mempertahankan privasinya. Mereka tidak boleh diekspos atau dipublikasikan kecuali ada dasar hukum yang jelas. Agar hak pribadi terdakwa tidak terganggu, informasi tentang kehidupan pribadinya harus dibatasi. Dalam hal ini, media massa, pihak ketiga, dan bahkan lembaga penegak hukum harus menghormati hak privasi terdakwa selama persidangan. Setiap informasi tentang status atau identitas terdakwa hanya boleh diberikan jika ada alasan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku. Ini tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bisnis atau untuk merugikan terdakwa. Jika hak privasi disalahgunakan, itu dapat merusak reputasi seseorang dan mengganggu keadilan dalam proses persidangan.

4. Hak untuk menghindari perlakuan tidak manusiawi

Prinsip ini memastikan bahwa terdakwa tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan fisik atau mental atau dengan cara yang merendahkan martabat manusia. Sangat dilarang oleh undang-undang untuk menggunakan kekerasan atau perlakuan yang merendahkan martabat terdakwa selama penahanan, penyidikan, atau persidangan. Setiap proses peradilan harus menghindari tindakan yang melanggar hak asasi manusia, seperti penyiksaan, perlakuan kejam, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, negara dan aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dilindungi dengan baik dan bahwa tidak ada upaya untuk memaksa terdakwa untuk mengakui pelanggaran. Perilaku yang tidak manusiawi ini juga dapat menyebabkan tekanan psikologis yang berlebihan pada terdakwa dan memengaruhi hasil dari persidangan.

Dalam sistem hukum pidana, hak-hak dasar terdakwa mencerminkan prinsip keadilan fundamental, yang melibatkan perlindungan terhadap kebebasan dan martabat setiap orang selama proses hukum. Untuk menjamin pelaksanaannya, sangat penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana beroperasi secara efisien dan adil, dengan memastikan bahwa terdakwa menerima hak-haknya. Hak-hak ini tidak hanya diberikan selama penyidikan dan persidangan, tetapi juga selama penahanan terdakwa. Terdakwa berhak atas perlakuan yang manusiawi dan tidak kekerasan, intimidasi, atau pengabaian hak-haknya.

Secara keseluruhan, hak-hak dasar terdakwa dalam sistem hukum pidana sangat penting untuk menjaga integritas proses peradilan karena memungkinkan setiap orang yang menjadi terdakwa menjalani proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Hak-hak ini juga memastikan bahwa sistem hukum beroperasi dengan baik tanpa melanggar hak asasi manusia. Tentu saja, penting untuk diingat bahwa hak-hak ini hanya dapat dilindungi jika ada kesadaran yang tinggi tentang pentingnya menjaga keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di setiap langkah proses hukum.

Salah satu aspek penting dalam perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara luas di berbagai sistem hukum di dunia adalah Hak Privasi, yang juga dibahas secara luas dalam konteks Hukum Pidana. Hak ini melindungi data pribadi, kehidupan pribadi, dan semua data yang dapat mengidentifikasi seseorang. Hak privasi ini sangat penting dalam hukum pidana, terutama untuk terdakwa yang sedang menghadapi proses peradilan. Sangat penting untuk menjaga hak privasi terdakwa dihormati karena mereka masih dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan pengadilan yang sah. Ini terutama berlaku dalam pemberitaan media massa, yang seringkali berpotensi mengungkapkan informasi yang tidak sah dan merugikan. Hak privasi bertujuan untuk menjaga martabat dan reputasi seseorang, sekaligus memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Terdakwa berhak untuk dilindungi dari penyebaran informasi yang dapat mencemarkan nama baik mereka atau merusak reputasi mereka selama proses peradilan pidana (Ali, 2017). Salah satu jenis perlindungan ini dapat diakses melalui:

1. Hak untuk menjaga kerahasiaan identitas

Media massa sangat berpengaruh terhadap opini publik, dan informasi yang disebarluaskan melalui pemberitaan dapat memengaruhi cara masyarakat melihat seorang terdakwa. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga identitas terdakwa tetap rahasia, terutama dalam kasus di mana status mereka masih sebagai tersangka atau belum ada putusan pengadilan yang sah. Sebelum ada keputusan yang jelas, mengungkapkan identitas terdakwa dapat merusak reputasi dan martabat seseorang. Meskipun seseorang belum diputuskan bersalah oleh pengadilan, ini sangat berbahaya jika seseorang dianggap bersalah hanya berdasarkan pemberitaan media.

Selain itu, hak untuk menjaga kerahasiaan identitas sangat penting untuk menghindari stigma sosial yang dapat memengaruhi terdakwa sebelum proses hukum berakhir. Dalam banyak kasus, media lebih cenderung mempublikasikan identitas terdakwa dan berbagai informasi tentang kehidupan pribadi mereka tanpa mempertimbangkan efek negatifnya. Bahkan sebelum terdakwa memiliki kesempatan untuk membela diri di persidangan, hal ini dapat menyebabkan masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap mereka. Sistem hukum yang adil memperlakukan semua orang sebagai tidak bersalah hingga ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Oleh karena itu, untuk memastikan prinsip ini tetap dihormati, sangat penting untuk menjaga kerahasiaan identitas terdakwa.

2. Hak untuk dilindungi dari pemberitaan yang merugikan

Dalam banyak kasus, media massa terkadang mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang adil dan objektif daripada memperhatikan aspek sensasional dari kasus pidana. Terdakwa dapat kehilangan reputasi dan martabat karena pernyataan yang tidak adil, memojokkan, atau bahkan menyudutkan mereka. Ini sering terjadi dalam kasus besar atau kontroversial, di mana media lebih tertarik untuk menarik perhatian publik daripada memberikan informasi yang akurat dan proporsional tentang proses hukum yang sedang berlangsung.

3. Hak untuk dilayani dengan manusiawi dalam pemberitaan media.

Media harus menghindari pemberitaan yang mempermalukan terdakwa atau mengungkapkan informasi pribadi secara berlebihan yang dapat memperburuk persepsi publik. Misalnya, media tidak boleh menampilkan foto atau video yang dapat memberikan kesan negatif terhadap terdakwa atau menyebarkan informasi yang sangat pribadi yang dapat membahayakan kehidupan pribadi mereka. Kadang-kadang, merinci terlalu banyak tentang kehidupan terdakwa, baik itu tentang latar belakang keluarga, masalah pribadi, atau bahkan kondisi fisik mereka, tidak relevan dengan kasus hukum yang sedang berlangsung dan dapat memperburuk stigma sosial yang mungkin mereka alami.

Jadi, hak privasi terdakwa adalah hak yang sangat penting dalam sistem hukum pidana, terutama dalam konteks pemberitaan media massa. Hak-hak ini tidak hanya melindungi individu terdakwa dari penyebaran informasi yang tidak sah, tetapi juga menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan itu sendiri. Media massa harus bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dalam pemberitaan dan menghindari pemberitaan yang bisa merugikan terdakwa sebelum adanya keputusan pengadilan yang sah. Dengan demikian, setiap orang yang menjadi terdakwa dalam proses hukum pidana dapat memperoleh perlakuan yang adil dan manusiawi, serta dapat menikmati hak privasi yang dijamin oleh hukum.

Dampak Pemberitaan Media Terhadap Opini Publik dan Kepercayaan Terhadap Sistem Peradilan.

Narasi yang muncul di media sosial sangat memengaruhi persepsi publik terhadap sistem peradilan. Media sosial seringkali memicu reaksi cepat dan intens terhadap masalah yang dibahas. Ini adalah tempat di mana konten dapat menyebar secara viral dan berulang kali dibagikan. Karena itu, persepsi publik terhadap institusi peradilan dapat berubah, atau bahkan dapat berubah dalam waktu singkat, tergantung pada cara warganet melihat dan menerima informasi tersebut (Fadli, 2020).

Media sosial dalam situasi ini memiliki dua fungsi: komunikasi dan pengawasan. Melalui berbagai platform, masyarakat dapat dengan mudah menekankan kinerja sistem peradilan. Media sosial berfungsi sebagai pengaruh masyarakat terhadap lembaga hukum karena komentar aktif masyarakat tentang keputusan pengadilan atau kasus besar. Media sosial bukan hanya forum diskusi; mereka juga memungkinkan orang untuk melihat dan mengkritik sistem peradilan secara langsung, bahkan menuntut reformasi hukum ketika banyak orang tidak puas.

Selain itu, media sosial adalah tempat yang bagus untuk mendorong perubahan. Kampanye advokasi yang tersebar luas di Twitter telah menunjukkan kasus hukum yang mungkin terabaikan oleh media konvensional. Kampanye yang melibatkan banyak orang dapat menimbulkan tekanan publik yang besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan. Seringkali, sentimen positif dihasilkan oleh kampanye advokasi ini, terutama ketika pemerintah atau lembaga hukum menanggapi tuntutan publik dengan tindakan konkret. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa media sosial memiliki sisi gelap, yang memungkinkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau manipulatif. Hal ini dapat menyebabkan orang memiliki pemahaman yang salah atau berlebihan tentang bagaimana sistem peradilan berfungsi. Orang-orang yang memiliki akses ke informasi yang cepat dan luas seringkali kesulitan membedakan fakta dari hoax, yang pada akhirnya memengaruhi cara mereka melihat masalah hukum yang sebenarnya lebih kompleks. (Muhammad, 2024).

Seperti halnya pengungkapan informasi pribadi atau sensasionalisasi yang berlebihan, hal itu juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan. Media dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap integritas proses hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan jika mereka terlalu berfokus pada aspek sensasional dari sebuah kasus tanpa memberikan konteks hukum yang cukup. Media memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam hal ini untuk menyampaikan pemberitaan yang adil, seimbang, dan objektif untuk menjaga hak privasi terdakwa dan memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan lancar.

Oleh karena itu, hubungan antara masyarakat Indonesia dengan sistem peradilan dan media sosial bersifat dua arah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kritik dan harapan mereka terhadap sistem hukum. Namun, kecenderungan informasi yang menyebar di media sosial juga dapat mengubah cara masyarakat memahami dan menilai institusi hukum. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk lebih berhati-hati saat menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak akurat atau merugikan.

Dengan Demikian, media sosial telah berkembang menjadi lebih dari sekadar alat untuk berkomunikasi; itu telah menjadi bagian penting dari sistem advokasi hukum dan pengawasan publik di Indonesia. Hubungan yang selalu berubah ini menunjukkan kekuatan media sosial dalam membentuk persepsi publik, baik positif maupun negatif.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa **Peran media massa** dalam proses peradilan pidana sangat signifikan, baik dalam membentuk opini publik maupun mempengaruhi jalannya proses hukum. Berikut adalah beberapa peran utama media massa dalam peradilan pidana:

1. Pengawasan Publik dan Transparansi

Media massa bertindak sebagai pengawas dalam proses peradilan pidana. Media menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus dengan memberitakan berbagai kasus. Isu-isu seperti penyimpangan proses, perlakuan yang tidak adil terhadap terdakwa, atau korupsi sistem hukum diungkapkan oleh media. (Doyle, A. 2011).

2. Pembentukan Opini Publik

Media massa memainkan peran penting dalam membentuk pendapat publik tentang kasus pidana. TV dan berita dapat memengaruhi cara orang melihat tersangka, korban, dan lembaga

hukum. Hal ini sering menimbulkan tekanan sosial terhadap pengadilan dan penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. (Greer, C., & Reiner, R. 2012).

3. Potensi Bias dan Pengadilan oleh Media

Media dapat bertindak sebagai "hakim" dalam kasus tertentu, terutama ketika mereka membangun cerita yang memojokkan salah satu pihak, baik itu terdakwa atau korban. Liputan yang tidak seimbang dapat memengaruhi proses peradilan dengan membentuk persepsi tertentu di kalangan jaksa, dan hakim. (Cavender, G., & Deutsch, S. K. 2007).

4. Edukasi Masyarakat tentang Proses Hukum

Media massa juga membantu masyarakat belajar tentang proses hukum. Media memberikan gambaran kepada publik tentang bagaimana sistem peradilan bekerja, hak-hak terdakwa, dan peran jaksa dan pengacara dalam proses hukum. (Surette, R. 2014).

5. Pemicu Reformasi Hukum

Liputan media tentang kasus kontroversial sering menyebabkan perdebatan publik dan reformasi hukum. Reformasi peradilan dapat fokus pada masalah seperti ketidakadilan, hukuman yang tidak proporsional, atau penyalahgunaan wewenang dalam proses pidana. (Lovell, J. S. 2003)

Media massa di Indonesia juga mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan peradilan pidana, seperti pemberitaan yang tidak bias dan profesionalisme dalam meliput kasus hukum.

KESIMPULAN

Media massa memainkan peran signifikan dalam proses peradilan pidana dengan menyediakan informasi kepada masyarakat secara luas, khususnya dalam kasus yang bersifat publik seperti korupsi, pembunuhan, dan pelanggaran hukum lainnya. Dalam perannya, media massa menghadirkan aspek kebebasan informasi, yang memungkinkan masyarakat untuk mengikuti jalannya proses hukum secara terbuka. Namun, pentingnya media massa dalam peradilan pidana juga harus dibarengi dengan batasan agar hak-hak individu, termasuk terdakwa, tetap terjaga, khususnya dalam hal privasi dan perlindungan terhadap prasangka publik.

Peran Media Massa dalam Proses Peradilan Pidana

1. **Sebagai Penyedia Informasi:** Media massa memberikan informasi yang relevan terkait kasus pidana kepada masyarakat. Ini termasuk penyebaran berita tentang proses pengadilan, dokumen pengadilan yang bersifat publik, dan keputusan pengadilan, yang membantu masyarakat memahami proses peradilan dan menilai keadilannya.
2. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:** Dalam beberapa kasus besar, seperti korupsi atau kejahatan dengan dampak luas, media massa membantu mengawasi dan meningkatkan transparansi proses hukum. Dengan sorotan media, lembaga hukum sering kali lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, karena publikasi berita dapat menambah tekanan untuk menegakkan hukum dengan adil dan transparan.
3. **Membangun Opini Publik:** Media massa dapat membentuk persepsi publik terhadap kasus pidana tertentu, baik secara positif maupun negatif. Hal ini dapat mempengaruhi opini publik, yang kadang kala dapat berdampak pada persepsi terhadap lembaga peradilan secara keseluruhan.
4. **Memperjuangkan Hak Publik untuk Mengetahui:** Dalam kasus-kasus penting, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan kasus pidana yang mungkin berdampak pada keamanan atau kepentingan umum. Media massa membantu dalam memberikan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Batasan Peran Media Massa

1. **Hak Terdakwa atas Privasi:** Media massa memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi terdakwa. Terlalu banyak eksposur terhadap identitas terdakwa sebelum adanya keputusan yang sah dapat merusak reputasi terdakwa dan melanggar prinsip "presumption of innocence" (asas praduga tak bersalah). Penyebaran informasi yang

sensasional sering kali merugikan terdakwa, terutama dalam kasus-kasus besar yang menjadi perhatian media.

2. **Pengaruh terhadap Proses Hukum:** Media massa yang memberitakan secara berlebihan atau tidak akurat dapat mempengaruhi opini publik, bahkan mempengaruhi jalannya proses peradilan. Jika juri, saksi, atau hakim terpapar oleh pemberitaan yang bersifat prasangka, ini bisa merusak integritas proses peradilan yang seharusnya netral.
3. **Informasi yang Mengganggu Proses Hukum:** Publikasi yang terlalu dini atau tidak sesuai dengan prosedur hukum dapat membahayakan investigasi dan mengganggu proses hukum. Informasi terkait strategi penyelidikan, bukti yang belum diajukan, atau rincian sensitif lainnya harus dikelola dengan hati-hati oleh media massa untuk menghindari dampak negatif terhadap keadilan proses hukum.
4. **Keseimbangan antara Hak Publik dan Hak Terdakwa:** Ada keseimbangan yang perlu dijaga antara hak publik untuk mendapatkan informasi dan hak-hak terdakwa, seperti privasi, presumption of innocence, serta hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak memihak. Media massa harus berperan secara objektif dan proporsional dalam meliput kasus-kasus pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Faisal Bakti, (2019), *Hukum Pidana dan Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Blanchette, Jean, & Johnson, Patrick (2004). *The Right to Privacy*.
- Cavender, G., & Deutsch, S. K. (2007). *CSI and Moral Authority: The Police and Science*. In *Law, Culture and Visual Studies* (pp. 217-238). Springer.
- Doyle, A. (2011). *Revisiting the Watchdog Role of the Media in Criminal Justice*. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 88(3), 581-599.
- Fadli, M, (2020), *Peran Media Sosial dalam Membangun Persepsi Publik terhadap Sistem Hukum di Indonesia*, *Jurnal Komunikasi dan Media Sosial*, 12(2).
- Greer, C., & Reiner, R. (2012). *Mediated Mayhem: Media, Crime, Criminal Justice*. The Oxford Handbook of Criminology. Oxford University Press.
- Hatta Ali, (2017), *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Herman, Edward S., & Chomsky, Noam (1988). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*.
- Laufer, William S. (2009). Artikel di *Journal of Criminal Justice* tentang hak privasi terdakwa.
- Lovell, J. S. (2003). *Media Power and Information Control: Investigating the Role of the Mass Media in the U.S. Criminal Justice System*. *Journal of Criminal Justice*, 31(4), 341-353.
- Mendelsohn, Matthew (2015). *The Media and the Criminal Justice System*.
- Rivaldy N.Muhammad, Lestari Wulandari, Biloka Tanggahma, *Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan : Analisis Sentimen di Twitter*, <https://review-unes.com/>, Vol.7 No.1.
- Romli atmasasmita, (1996), *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksestensialisme dan Abolisianisme*, Bandung : penerbit binacipta.
- Surette, R. (2014). *Media, Crime, and Criminal Justice: Images, Realities, and Policies*. Wadsworth Publishing.
- Undang-undang no.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, Penerbit cemerlang, 2005.